

DISERTASI

KONSEP PENCABUTAN HAK POLITIK SECARA PERMANEN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN

*The Concept Of Permanent Deprivation of Political Rights For
Perpetrators Of Corruption Based On The Value Of Justice*



OLEH :

JAILANI

NIM : 133.1.600.014

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021

DESERTASI

KONSEP PENCABUTAN HAK POLITIK SECARA PERMANEN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN

*The Concept Of Permanent Deprivation of Political Rights For Perpetrators
Of Corruption Based On The Value Of Justice*



Diajukan Oleh :

JAILANI

NIM : 133.1.600.014

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2020

**KONSEP PENCABUTAN HAK POLITIK SECARA PERMANEN
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Diajukan Oleh :

JAILANI
NIM : 1331600014

Diajukan Untuk Ujian Terbuka Disertasi
Program Studi Doktor Ilmu Hukum

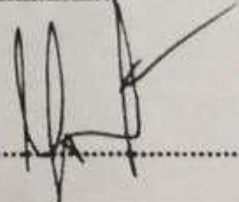
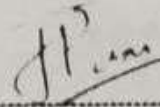
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah disetujui untuk di uji

Pada tanggal 8 Januari 2021

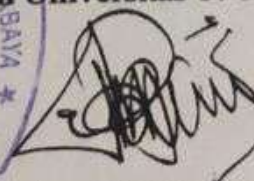
Prof. DR. Teguh Prasetyo, SH, Msi.
Promotor :

DR. Otto Yudianto, SH. Mhum.
Ko-Promotor :



Mengetahui :

**Ketua Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya**



(DR. Hj. Endang Prasetyawati, SH.MH)

LEMBAR PENGESAHAN

KONSEP PENCABUTAN HAK POLITIK SECARA PERMANEN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Disusun Oleh :

JAILANI
NIM : 1331600014

Telah Diuji dan Direvisi di Depan Tim Penguji Pada Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada tanggal 8 Januari 2021

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, M.M. C.M.A. C.P.A

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH. MH

Promotor : Prof.Dr. Teguh Prasetyo,SH. MSi

Ko-Promotor : Dr. Otto Yudianto, SH. Mhum

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, SH. MHum

: Dr. Endang Prasetyawati, SH.Mhum

: Dr. Erny Herlin Setyorini, SH. MH

: Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH. MH

: Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, SH. MM

: Prof. Dr. Sam Abede Pareno, MM



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DESERTASI

Dengan hormat,

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jailani
NIM : 1331600014
Mahasiswa : Program Studi Doktor Hukum
Angkatan/Thn : 31 / 2016

**“KONSEP PENCABUTAN HAK POLITIK SECARA PERMANEN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN
NILAI KEADILAN”**

***“ THE CONCEPT OF PERMANENTLY DEPRIVING POLITICAL RIGHTS
FOR PERPETRATORS OF CORRUPTION BASED ON
THE VALUE OF JUSTICE”***

Penulisan Desertasi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya di dalam naskah desertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi manapun dan tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata di dalam naskah desertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dari gelar akademik yang telah saya peroleh (*Doctor*) dibatalkan, serta proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya unsur paksaan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya serta diucapkan terima kasih.

Surabaya,..... - 2020

Hormat Saya



(JAILANI)



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jailani
NBI : 1331600014
Fakultas : Universitas 17 Agustus 1945
Program Studi : Doctor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive
Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

Konsep Pencabutan hak politik secara permanen
bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan
nilai Keadilan

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-
Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Jailani

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat pada Tuhan Yang Maha Esa yang mana penulisan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini dengan judul “Konsep Pencabutan Hak Politik Secara Permanen Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan” diajukan sebagai tugas akhir dalam meraih Gelar Doctor Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Disadari bahwa penelitian penulisan ilmiah ini tentunya banyak kekurangan, dan jauh dari sempurna karena perkembangan ilmu hukum sedemikian pesatnya. Oleh karena itu kekurangan yang ada dalam penulisan penelitian disertasi ini semata keterbatasan wawasan dan pola pikir di dalam menerima teori dan menuangkan di dalam tulisan ini. Penelitian ini hanya terbatas pada penelitian tentang Konsep Pencabutan Hak Politik Secara Permanen Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai Keadilan. Yang berasaskan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat indonesia, maka rakyat indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum.

- Oleh karena itu dalam kesempatan ini disampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada : Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., Msi., selaku Promotor dan Dr. Otto Yudianto, SH., Mhum., selaku Ko - Promotor yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi, bimbingan, arahan dan masukan sejak proses awal Prakuifikasi, MKPD, Proposal, Finalisasi, Tertutup hingga penyelesaian ahir penulisan disertasi ini.
- Dr. H. Slamet Suhartono, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberi motivasi atau pengarahan dalam suasana akademik yang kondusif.
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH., MH., Ketua Program Studi Doktor Hukum beserta Dewan Punguji lainnya dan seluruh staf pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu serta secara langsung atau tidak langsung dalam rangka penuntasan penulisan disertasi ini sampai ujian akhir studi.
- Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang ikut memberikan dorongan dan motivasi pada penulis sehingga terwujudnya hasil karya ilmiah ini. Seluruh teman fakultas Doktor Ilmu Hukum angkatan 31, serta keluarga yang menjadikan saya mampu bertahan dalam penyelesaian sampai menyanggah gelar Doctor Hukum.

Semoga budi baik bapak Promotor dan Ko-Promotor serta teman DIH 31 dan semuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin Yerobbal Alamin.

Surabaya, 8 Januari 2021



(JAILANI)

ABSTRACT

The Corruption in Indonesia has been spread in the society it is increased from year, both in the number of cases or amount of state financial losses and the quality of criminal acts which carried out more systematic and its scope which entered to the whole aspect of society recently, the type of corruption that commonly happened is political corruption committed by public officials, such as the regional head, Member of legislative assembly, regional legislative assembly, etc. As a prevention effort and the eradication of the corruption, law enforcement officer especially KPK make a break through by proposing additional criminal charges with a revocation sentence of political right. This is not a new sentence, but has previously stated in Article 35 paragraph (1) of the criminal code, but it is rarely used by law enforcement officers.

The type of this research is a normative juridical research which focused on literature study, the acquired data either from literatur research or fild research analyzed using normative descriptive approach. Legally, the implementation of the revocation sentence of political right in corruption cases is according to the Article 18 paragraph (1) Law No. 20 of 2001 jo. Article 10 letter b numeral 1 of the criminal code.

The parameters used to determine whether the judge would drop the revocation sentence of political right or not are the position of the accused, the characteristic of the crime, judges also had to determine the period of the revocation of the right appropriate with Article 38 paragraph (1) of the code. Revocation of political right increasingly has urgency with the issuance of PKPU regulation Number 20 concerning the nomination of members of the DPR, provincial DPRD and regency and city DPRD. This PKPU decision is contrary to MK decision Number 42/PUU-XII/2015 and artichel 240 paragrap (1) letter g of law 7 of 2017 concerning general election.

Keyword : Corruption, Additional Sentencing, Political Rights.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Orisinalitas Penelitian	5
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu	5
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Sekarang	9
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep	10
1.6.1 Landasan Teori.....	10
1.6.1.1. Teori Keadilan	10
1.6.1.2. Teori Negara Hukum	12
1.6.1.3. Teori Pemidanaan	16
1.6.1.4. Teori Kewenangan	17
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	20
1.6.2.1. Hak Politik Warga Negara.....	20
1.6.2.2. Tindak Pidana Korupsi	24
1.6.2.3. Sanksi Pencabutan Hak Politik.....	26
1.6.2.4. Konsep Hak Asasi Manusia.....	28
1.7. Metode Penelitian	30
1.7.1. Jenis Penelitian	30
1.7.2. Pendekatan Masalah	31
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	31
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	32
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	33
1.8. Pertanggungjawaban Sistematis.....	33
BAB II RASIO LEGIS PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	
2.1. Rasio Legis Pencabutan Hak Politik.....	34
2.2. Hak Dipilih Dalam Perspektif HAM.....	36
2.3. Hak Dipilih Menurut Undang - Undang Dasar 1945.....	38
2.4. Fungsi dan Peranan Lembaga Pemberantasan Korupsi.....	41
2.4.1. Kepolisian Republik Indonesia.....	41
2.4.2. Kejaksaan Republik Indonesia.....	43

2.4.3. Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	45
2.4.4. Komisi Pembrantasan Korupsi.....	47
2.5. Pengaturan Pencabutan Hak Politik.....	49
2.5.1. Pencabutan Hak Politik Menurut pasal 35 Ayat 1 KUHP.	49
2.5.2. Pencabutan Hak Politik Menurut UU Korupsi.....	50
2.6. Rasio Legis Pencabutan Hak Politik.....	50
2.6.1. Alasan Hukum Menurut Teori Pidana.....	50
2.6.2. Alasan Filosofis Menurut Teori Negara Hukum.....	51

BAB III PENCABUTAN HAK POLITIK BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN NILAI KEADILAN

3.1. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 Bertentangan Dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.....	53
3.2. Aturan PKPU Tentang Larangan Mantan Koruptor.....	57
3.3. Putusan Mahkamah Agung tentang Mantan Koruptor.....	59
3.4. Pencabutan Hak Dipilih Secara Permanen Berdasarkan Nilai Keadilan.....	61
3.5. Konsep Pengaturan Pencabutan Hak Politik Secara Permanen..	63
3.5.1. Dikaji dari Teori Keadilan.....	63
3.5.2. Dikaji dari Sila ke dua dan ke lima Pancasila.....	65
3.5.3. Dikaji dari Teori Kewenangan.....	67

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	70
4.2. Saran.....	70

DAFTAR BACAAN